DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

KEPENTINGAN DJIBOUTI DALAM MENERIMA PANGKALAN MILITER ASING TIONGKOK TAHUN 2017

Putra Ari Handoyo[1]

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Djibouti, a small country strategically located at the entrance of the Red Sea, has garnered global geopolitical attention due to its policy of hosting foreign military bases. One of the most significant developments was the establishment of a Chinese military base in 2017. This study analyzes Djibouti's interests in accepting foreign military bases, particularly China's, and the implications of this policy. Three key factors driving this decision are the economic benefits from base leases and infrastructure investments, the enhancement of national security and stability, and the strengthening of Djibouti's diplomatic position in global dynamics. However, hosting foreign military bases also presents challenges, including potential sovereignty concerns, environmental impacts, and escalating geopolitical tensions among major powers with vested interests in the region, such as the United States and Japan. By adopting an analytical approach to Djibouti's policies, this study highlights how the country balances strategic advantages with the risks associated with foreign military presence on its soil.

Keywords: Djibouti, foreign military bases, China, geopolitics, national interest.

ABSTRAK

Djibouti, sebuah negara kecil dengan lokasi strategis di pintu masuk Laut Merah, telah menarik perhatian geopolitik global dengan kebijakannya menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer asing. Salah satu perkembangan signifikan adalah pendirian pangkalan militer Tiongkok pada tahun 2017. Penelitian ini menganalisis kepentingan Djibouti dalam menerima pangkalan militer asing, khususnya yang didirikan oleh Tiongkok, serta implikasi dari kebijakan tersebut. Tiga faktor utama yang mendasari kebijakan ini adalah keuntungan ekonomi dari sewa pangkalan dan investasi infrastruktur, peningkatan keamanan dan stabilitas nasional, serta penguatan posisi diplomatik Djibouti dalam dinamika global. Namun, keberadaan pangkalan militer asing juga menimbulkan tantangan, termasuk potensi pelanggaran kedaulatan, dampak lingkungan, serta meningkatnya ketegangan geopolitik antara negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dengan mengadopsi pendekatan analitis terhadap kebijakan Djibouti, penelitian ini menyoroti bagaimana negara tersebut menyeimbangkan keuntungan strategis dengan risiko yang muncul akibat kehadiran militer asing di wilayahnya.

Kata kunci: Djibouti, pangkalan militer asing, Tiongkok, geopolitik, kepentingan nasional.

PENDAHULUAN

Djibouti, sebuah negara kecil yang terletak secara strategis di pintu masuk Laut Merah, telah menjadi pemain penting dalam lanskap geopolitik karena kesediaannya menjadi tuan rumah pangkalan militer asing. Salah satunya, pendirian pangkalan militer Tiongkok pada tahun 2017, telah menarik perhatian yang signifikan. Esai ini akan membahas kepentingan beragam Djibouti dalam menjadi tuan rumah pangkalan militer asing, khususnya mengeksplorasi implikasi dan motivasi di balik penerimaan kehadiran militer Tiongkok.

Pertama-tama, keputusan Djibouti untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer asing didorong oleh pertimbangan ekonomi. Sebagai negara dengan sumber daya alam

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

yang terbatas dan pasar domestik yang kecil, Djibouti berupaya memanfaatkan lokasinya yang strategis sebagai pusat transit untuk perdagangan internasional dan jalur pengiriman. Menjadi tuan rumah pangkalan militer, termasuk dari Tiongkok, memberikan sumber pendapatan yang signifikan melalui perjanjian sewa dan layanan terkait. Masuknya modal ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi, proyek infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja, memperkuat stabilitas keuangan Djibouti dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri.

Kedua, kehadiran instalasi militer asing meningkatkan keamanan dan stabilitas Djibouti. Terletak di wilayah yang rentan terhadap konflik dan kejahatan maritim, Djibouti menghadapi tantangan keamanan yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayahnya. Menjadi tuan rumah pasukan militer asing, terutama dari negara-negara kuat seperti Tiongkok, bertindak sebagai pembatas terhadap agresi eksternal dan destabilisasi internal. Aliansi militer ini memberikan jaminan keamanan bagi Djibouti dan akses ke kemampuan militer canggih, memperkuat kemampuan pertahanannya dan memperkuat posisinya dalam arsitektur keamanan regional.

Selanjutnya, menjadi tuan rumah pangkalan militer asing memperkuat hubungan diplomatik dan pengaruh geopolitik Djibouti. Dengan mengakomodasi pasukan militer dari berbagai negara, Djibouti membangun hubungan diplomatik dan kemitraan strategis secara global. Kehadiran pasukan Tiongkok bersama dengan pasukan dari kekuatan Barat menciptakan aksi diplomasi yang seimbang, memungkinkan Djibouti untuk menavigasi hubungan internasional yang kompleks dan mengambil manfaat dari berbagai aktor. Selain itu, menjadi tuan rumah pangkalan militer asing meningkatkan status Djibouti sebagai pemain kunci dalam urusan regional, memungkinkannya untuk mengeksploitasi pengaruhnya dan memediasi konflik di Afrika Timur dan sekitarnya.

Namun demikian, penerimaan Djibouti terhadap pangkalan militer asing, termasuk dari Tiongkok, tidaklah tanpa tantangan dan risiko. Para kritikus berpendapat bahwa kehadiran pasukan asing melanggar kedaulatan Djibouti dan menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh dan ketergantungan yang berlebihan. Selain itu, dampak lingkungan dari kegiatan militer, seperti polusi dan kerusakan habitat, membawa risiko terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat Djibouti yang rapuh. Selain itu, menjadi tuan rumah pangkalan militer asing telah memicu ketegangan dengan negara tetangga dan aktor regional lainnya, memperburuk persaingan geopolitik dan dilema keamanan di Afrika Timur.

Selain beberapa anggota NATO, Djibouti juga digunakan sebagai pangkalan militer negara non-NATO seperti China dan Jepang. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok telah membangun markas besar yang mereka sebut sebagai "Pusat Logistik". Meski pemerintah China mengklaim bahwa pangkalan militer yang mereka bangun di Djibouti adalah fasilitas logistic yang mendukung operasi penjaga perdamaian di perairan Aden, namun beberapa sumber menduga pangkalan militer China di Djibouti hanyalah fasilitas logistik. Faktanya, sebidang tanah seluas 200 hektar, yang oleh pemerintah Tiongkok disebut sebagai "pusat logistik", mungkin merupakan pangkalan militer yang sebenarnya dapat menampung hingga satu batalion yang terdiri dari tentara dan memiliki empat tingkat keamanan.[1] Selain itu, pangkalan Tiongkok di Djibouti juga memiliki hanggar pesawat dan drone, galangan kapal, dan

[1] Vinayak Bhat. China's Mega Fortress in Djibouti Could Be Model for Its Bases in Pakistan. Diakses dari https://theprint.in/defence/china-mega-fortress-djibouti-pakistan/11031/ pada 5 Februari 2024.

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

fasilitas bawah tanahdengan luas 23.000 meter persegi.[2] Pangkalan militer Tiongkok di Djibouti adalah pangkalan militer asing pertama Tiongkok.

Seperti Tiongkok, Jepang juga merupakan salah satu negara non-NATO yang mendirikan pangkalan militer di Djibouti, dan juga merupakan pangkalan militer asing pertama mereka. Jepang membangun pangkalan militer pada tahun 2011 untuk menunjukkan kebijakan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mengubah pasal 9 Konstitusi Jepang. Awalnya, Jepang membangun pangkalan militernya di Djibouti dengan luas 12 hektar, untuk menampung 180 tentara. , dermaga untuk satu kapal perang dan hanggar yang dapat menampung beberapa pesawat patroli maritim.[3] Pada tahun2011, Jepang mengerahkan satu kapal perang dan dua pesawat patroli maritim P-3C Orion di pangkalan militernya di Djibouti.[4]

Angkatan bersenjata beberapa negara North Atlantic Treaty Organization (NATO) memegang kue paling banyak bila berbicara jumlah pangkalan militer di Djibouti, antara lain dari Amerika Serikat, Italia, Spanyol dan Perancis. Perancis merupakan negara pertama yang mendirikan pangkalan militer di Djibouti.[5] Meski Djibouti telah merdeka dari negara Perancis, pasukan bersenjata Perancis tetap bertahan hingga saat ini. Terdapat 2 resimen pasukan militer Perancis (1.500-2.900 prajurit), 1 pesawat kargo militer, 10 pesawat tempur, 1 pesawat patroli maritim serta 10 helikopter militer. Pangkalan militer Perancis di Djibouti merupakan pangkalan militer overseas Perancis yang terbesar yang Perancis miliki. Di pangkalan militer Perancis juga terdapa pasukan Jerman yang ikut andil dalam misi di Afrika, khususnya di Horn of Africa.[6]

Italia mendirikan pangkalan militer di Djibouti pada tahun 2013 dengan nama Pangkalan Dukungan Nasional Italia. Terletak di dekat Bandara Internasional Ambouli Djibouti, pangkalan tersebut menampung sekitar 80 tentara Italia. Pangkalan Italia dapat menampung hingga 300 tentara dan drone. Spanyol menjadi negara kedua setelah Italia yang ikut serta dalam pendirian pangkalan militer di Djibouti. Meski kedatangannya tidak sebesar negara NATO lainnya, Spanyol turut andil dalam pendirian pangkalan militer di Djibouti.

Amerika Serikat adalah negara NATO kedua yang mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Meskipun pangkalan militer AS mulai beroperasi pada awal tahun 2000-an, kedatangan mereka secara umum lebih besar dibandingkan negara-negara NATO lainnya. Amerika Serikat menyewa Kamp Lemonnier, bekas pangkalan militer Prancis di Djibouti. Amerika Serikat memulai perluasan Kamp Lemonnier seluas 202 hektar pada tahun 2007, dilengkapi dengan dermaga kapal perang dan bandara untuk pesawat patroli dan pesawat tempur.[7] Kamp Lemonnier adalah satu-satunya pangkalan militer AS yang permanen dengan unit di Afrika, meskipun Djibouti belum menjadi satu-satunya pangkalan militer AS yang permanen di Afrika.

---

[2] Joseph Trevithick. China's Base in the Horn of African Has a Huge Underground Bunker. Diakses dari https://www.thedrive.com/the-war-zone/12959/chinas-base-in-the-horn-of-africanhas-a-huge-underground-bunker pada 5 Februari 2024.
[3] Neil Melvin. The Foreign Military Presence in the Horn of Africa Region. (Solna: Stockholm International Peace Research Forum, 2019) hlm. 10
[4] Ibid., hlm. 11
[5] Degang Sun dan Yahia H. Zoubir. The Eagle's Nest in the Horn of Africa: US Military Strategic Deployment in Djibouti. Jurnal "Africa Spectrum" 1/2016 (Hamburg: German Institute of Global and Area Studies, 2016) hlm. 113
[6] Ibid., hlm. 7.
[7] Degang Sun dan Yahia H. Zoubir. The Eagle's Nest in the Horn of Africa: US Military Strategic Deployment in Djibouti. Jurnal "Africa Spectrum" 1/2016 (Hamburg: German Institute of Global and Area Studies, 2016) hlm. 112

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

Terkait pendirian pangkalan militer oleh berbagai negara, ahli mempertanyakan kebijakan negara Djibouti yang mengizinkan negara Tiongkok mendirikan pangkalan militer dan motif dibalik pendirian pangkalan militer di Djibouti. Menurut peneliti, mengajak China mendirikan pangkalan militer di Djibouti sangat berisiko bagi Djibouti, karena Amerika Serikat dan sekutunya sudah lebih dulu mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Asumsi yang mendasari para peneliti adalah mengundang Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti merupakan kebijakan yang sangat beresiko karena Amerika dan Tiongkok sering atau bahkan sedang terlibat konflik kepentingan seperti pendirian Taiwan, Sengketa Laut Cina Selatan hingga perang dagang. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha mencari jawaban atas asumsi tentang kebijakan apa langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Djibouti sebanding dengan risiko yang ada. Adanya gesekan antara Amerika Serikat dan China secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada negara Djibouti yang notabene merupakan rumah bagi kedua negara tersebut. Selain Amerika, China juga berselisih dengan salah satu dari negara yang juga mendirikan pangkalan militer di Djibouti, yakni Jepang.

Hubungan AS-Tiongkok sepertinya tidak sebaik hubungan Djibouti-AS dan hubungan Djibouti dengan Tiongkok. Hubungan Djibouti dengan Amerika berjalan sangat baik dan tidak ada masalah besar. Salah satu bentuk implementasi atau hasil hubungan antarnegara adalah dengan pangkalan militer asing permanen AS di Djibouti, satu-satunya pangkalan permanen asing AS di Afrika. Pangkalan militer AS terletak di Camp Lemmonier, yang dulunya merupakan pangkalan militer Perancis. Hubungan Djibouti dengan Amerika Serikat juga menghasilkan kerja sama di bidang kesehatan dan pendidikan,dan bantuan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).[8]

Meskipun Djibouti belum menjadi sekutu Amerika, namun Amerika Serikat berani mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Setelah Djibouti mengizinkan Tiongkok mendirikan pangkalan militer di wilayahnya, Amerika Serikat kini menjadi negara adidaya "tetangga" dengan ambisi tinggi untuk memproyeksikan kekuatan dan menyebarkan kepentingan mereka ke Afrika.[9]

Hubungan Djibouti dengan Tiongkok juga mirip dengan hubungan Djibouti dengan Amerika Serikat. Negara tersebut menjaga hubungan bilateral yang baik dan juga menerima permintaan pemerintah Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti, sama seperti Amerika Serikat membangun pangkalan militer di Djibouti, Djibouti juga menjalin kerja sama dalam bidang perekonomian dan tergabung dalam proyek One Belt One Road yang digagas oleh Tiongkok, dimana Djibouti berkesempatan mendapatkan pinjaman dari Tiongkok untuk membangun infrastruktur miliknya sendiri..

Selain masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti juga berupaya untuk mengetahui implikasi apa pun dari pemberian akses militer asing Tiongkok terhadap pembukaan pangkalan militer di Djibouti. Peneliti meyakini bahwa Djibouti menganalisis segala aspek dengan menerima seluruh tentara asing dari negara-negara yang mengusung kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional negara-negara yang membangun pangkalan militer di Djibouti sedikit banyak mempengaruhi Djibouti, baik secara positif

[8] U.S. Department of State. U.S. Relations with Djibouti. Diakses dari https://www.state.gov/u-srelations-with-djibouti/ pada 5 Februari 2024.

[9] Shitao Li. Djibouti military base 'a manifestation of China's global interests.' Diakses dari https://www.dw.com/en/djibouti-military-base-a-manifestation-of-chinas-global-interests/a39659013 pada 5 Februari 2024.

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

maupun negatif. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dibuat dengan judul **"Analisis Kepentingan Djibouti Dalam Menerima Pangkalan Militer Asing Tiongkok Tahun 2017".**

KERANGKA ANALITIK

Neo-Realisme

Penelitian ini menggunakan teori neorealisme. Teori ini didasarkan pada premis bahwa hubungan antar negara, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik, dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep anarki neorealis. Keseimbangan kekuatan internasional ditentukan oleh perubahan distribusi kemampuan, dan distribusi kemampuan menjadi distribusi kekuatan ekonomi dan militer. Neorealisme juga cenderung hanya berfokus pada kebijakan negara-negara besar. Hal ini karena negara-negara besar mempunyai kekuasaan untuk mengatur sistem internasional.[10]

Neorealisme merupakan teori penting dalam penelitian hubungan internasional, yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang dinamika sistem internasional. Teori ini muncul sebagai respons terhadap pemahaman tradisional ilmu relasional yang menekankan peran negara dan faktor manusia dalam hubungan internasional. Neorealisme mengalihkan fokusnya pada struktur sistem internasional itu sendiri dan menekankan pentingnya faktor sistem dalam menentukan perilaku negara di panggung dunia.

Kenneth Waltz, salah satu eksponen neorealisme menjelaskan, tidak ada otoritas pusat dalam sistem internasional yang mengatur interaksi antar negara. Di dunia yang kacau ini, setiap negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasionalnya. Ia mengatakan bahwa anarki adalah premis fundamental dari sistem internasional. Artinya negara-negara mengupayakan kekuatan dan keamanan dalam situasi kacau agar dapat bertahan dalam sistem yang penuh ketidakpastian.[11]

Neorealisme menjelaskan bahwa sistem internasional mempunyai pembagian tripolar: sistem bipolar, multipolar, dan unipolar. Dalam sistem multipolar, negara-negara bersatu dan bersaing satu sama lain untuk mengamankan tempat mereka dalam hierarki dunia. Namun dalam sistem unipolar, terdapat satu negara dominan yang memiliki keunggulan signifikan dalam mengatur dunia. Hal ini juga menjelaskan bahwa dalam sistem internasional unipolar, negara-negara dominan tidak memiliki insentif yang kuat untuk membentuk aliansi. Namun negara-negara lain juga akan mencari cara untuk membatasi kekuasaannya.[12]

Dari perspektif neorealis, hal ini bukan semata-mata tentang faktor manusia seperti kebijakan pemerintah atau niat para pemimpin. Namun dalam pandangan ini, perilaku negara dinilai bukan berdasarkan motif dan karakteristik individu, melainkan berdasarkan struktur sistem internasional. Namun neorealisme mendapat kritik karena pandangan ini dianggap terlalu deterministik dan kurang memperhatikan unsur-unsur yang tidak realistis dalam sistem internasional, termasuk nilai-nilai normatif dan institusi internasional.

---

[10] Muhamad Rosyidin, Teori Hubungan Internasional; dari perspektif klasik sampai non-barat (Depok : Rajawali Press, 2020) 33-34.

[11] Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. Hal 134

[12] Burchill, The National Interest in International Relations Theory, hal 104

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "action theory", atau kebijakasanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Kebijakan luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu: kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*). Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah, dan keadaan startegis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.

Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitment konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesisfik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri.

Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik.

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Djibouti dalam menerima pangkalan militer asing, termasuk dari Tiongkok, dapat terkait erat dengan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, Djibouti mungkin melihat kehadiran pangkalan militer asing sebagai cara untuk memperkuat keamanan dan stabilitas dalam negeri, meningkatkan pengaruh regional, serta mendapatkan manfaat ekonomi. Dengan memiliki pangkalan militer asing, Djibouti dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya, menjaga kedaulatannya, dan melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman luar. Selain itu, kerjasama militer dengan negara seperti Tiongkok juga dapat membuka pintu untuk kerja sama diplomatik dan ekonomi yang lebih luas, yang dapat meningkatkan kedudukan Djibouti di tingkat internasional. Dengan demikian, keputusan Djibouti untuk menerima pangkalan militer asing mencerminkan upaya negara tersebut dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam menjaga keamanan, meningkatkan stabilitas, dan memperkuat posisi di tingkat regional dan global.

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

Kepentingan nasional mempunyai arti yang bermacam-macam. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah untuk bertahan hidup, yaitu melindungi identitas nasional, politik, dan budaya dari campur tangan negara lain.

Menurut Charles Lersch dan Abdul, kepentingan nasional adalah tujuan yang paling penting, berjangka panjang, dan berkelanjutan dari negara, rakyatnya, dan negara di mana pemerintah bertindak sebagai pejabatnya. Di sisi lain, menurut Mr.

Vernon dari Dyke College, kepentingan nasional mengacu pada upaya negara-negara untuk melindungi dan membangun hubungan satu sama lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai cita-cita jangka panjang suatu negara terhadap tujuan pokok, pencapaian, dan kebutuhan yang diinginkan negara tersebut.

Ada banyak tujuan berbeda yang sering kali menjadi bagian dari kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori tergantung pada isinya: kepentingan politik, kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan budaya. Masing-masing kategori ini dapat dipecah menjadi bentuk minat yang lebih mendasar.

Kategori kepentingan politik meliputi kedaulatan nasional atas negara sendiri. Di sisi lain, kepentingan keamanan dapat dibagi menjadi superioritas militer, keamanan regional, kepentingan maritim, dan lain-lain. Kepentingan ini sangat penting bagi kepentingan nasional negara, karena menyangkut keberlanjutan dan keamanan negara dan rakyatnya. Dari segi ekonomi dapat dibedakan menjadi perdagangan, penanaman modal asing, kegiatan perekonomian nasional, dan lain-lain. Dalam kepentingan nasional, kepentingan ekonomi pada umumnya dianggap sebagai kepentingan yang paling mendasar dibandingkan kepentingan lainnya. Kategori terakhir dari kepentingan nasional adalah kepentingan kebudayaan, yang diwujudkan dalam pemajuan kebudayaan, perlindungan dari paham dan ideologi asing, dan sebagainya.

Kepentingan nasional dinilai penting dalam membangun hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan nasionalnya. Melalui tujuan dan aspirasi nasional yang diartikulasikan dalam kepentingan nasional, suatu negara menentukan arah di mana hubungan dengan negara lain harus dibangun sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Konsep Pangkalan Militer Luar Negeri (Overseas Military Base)

Pangkalan militer adalah fasilitas yang didirikan untuk mendukung logistik dan operasi militer, dan pangkalan militer asing adalah pangkalan militer yang terletak di dalam wilayah negara lain. Pangkalan militer pertama disebutkan dalam tulisan Thucydides, yang bertempur dalam Perang Peloponnesia pada abad ke-5 SM. Pangkalan militer asing semakin berkembang seiring berjalannya waktu, terutama dari abad ke-15 hingga ke-20, mengingat seringnya perluasan yang dilakukan oleh kekuatan kolonial. Kedatangan pangkalan militer asing mencapai puncaknya pada abad Perang Dunia I dan II termasuk di antara alasan yang membenarkan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan negara-negara besar lainnya untuk mendirikan pangkalan militer asing di negara-negara berdaulat. Rencana Penahanan Amerika Serikat dan Tirai Besi Uni Soviet bertujuan untuk bersaing mendapatkan pengaruh politik di Eropa ketika Perang Dingin mendorong kedua negara untuk semakin mendirikan pangkalan militer di luar wilayah mereka sendiri.

Terdapat berbagai pembenaran bagi suatu negara untuk mendirikan pangkalan militer di luar kedaulatannya, dan terdapat juga pembenaran bagi suatu negara untuk menampung kedatangan tentara asing. Mulai dari poin pertama , membangun pangkalan militer di luar negeri merupakan salah satu cara yang tepat untuk mendapatkan pengaruh.

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

Artinya, negara yang mendirikan pangkalan militer asing telah berhasil memperoleh pengaruh di negara tempatnya mendirikan pangkalan militer asing, terlepas dari apakah negara yang mendirikan pangkalan militer asing tersebut ingin memperluas pengaruhnya di negara lain. negara atau di negara lain yang mengundang negara-negara lain untuk mendirikan pangkalan semi-militer , berada di bawah pengaruh ini.

Studi kasus yang dapat peneliti gunakan untuk memahami apa yang dijelaskan pada kalimat sebelumnya adalah pangkalan udara militer Khmeimin di Suriah. Pemerintah Suriah memutuskan untuk mengundang Rusia untuk mendirikan pangkalan militer permanen di Kmeymin untuk mengekang pengaruh Amerika Serikat dalam mendukung oposisi pemerintah Suriah. Akibatnya, Suriah akan berada langsung di bawah pengaruh Suriah. Rusia berupaya mengekang pengaruh AS di Suriah.

Selain itu, pangkalan militer asing termasuk di antara infrastruktur masa perang yang membantu mendukung semua operasi militer, termasuk operasi militer masa perang dan operasi militer non-perang yang dilakukan di luar negeri. Kehadiran pangkalan militer di luar negeri dapat mendukung operasi militer, karena mendukung logistik perang dan menjadi batu loncatan dalam pelaksanaan operasi militer. Berdasarkan definisi yang dipaparkan para peneliti, setiap fasilitas militer, fasilitas logistik, atau apapun yang berhubungan dengan operasi militer, seperti pangkalan militer Tiongkok di Djibouti, adalah pangkalan militer, meskipun pemerintah Tiongkok merujuk pada hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini daya yang diperoleh adalah data deskriptif mengenai penjelasan kepentingan Djibouti dalam menerima pangkalan militer Tiongkok. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memilki tujuan dalam mengetahui dan memahami fenomena dan peristiwa yang dialami oleh suatu objek dalam sebuah interaksi sosial bermasyarakat guna mencari dan menentukan makna dalam konteks tersebut.[13]

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan pencarian makna, pemahaman, dan penjelasan mengenai suatu peristiwa dengan secara langsung maupun tidak langsung yang diteliti secara menyeluruh. Metode kualitatif sering dikenal sebagai metode alamiah karena pada dasarnya metode penelitian ini menjelaskan mengenai kenyataan dan keutuhan yang tidak dapat dipahami dan dipisahkan dalam konteksnya.[14] Maka dari itu, sejalan dengan penjelasan mengenai metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengahsilakan data deskriptif berupa tulisan dan juga informasi yang peneliti dapatkan sehingga peneliti mendapatkan makna dari penelitian ini dengan kepentingan Djibouti dalam menerima pangkalan militer Tiongkok.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis, dimana tipe ini merupakan metode yang berguna untuk mencari, mencatat, mendata dan mengeksplorasi suatu peristiwa secara mendalam berdasarkan data atau informasi yang diperlukan secara detail menggunakan prosedur pengumpulan data selama periode tertentu guna menciptakan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan aktual tentang fakta dan realita yang dimiliki dalam hubungan antara fenomena atau kejadian yang diteliti.[15] Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data serta informasi sesuai fakta untuk

[13] Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) Hal 6
[14] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. 20th.(Bandung: Alfabeta, 2014)
[15] Creswell, John. Research Design . 4th. (SAGE,2018) 4

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL **Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional** **Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187** **e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497**	Article History: *Submitted: Jan 21, 2025* *Accepted: Feb 18, 2025* *Published: Apr 14, 2025*

mengeksplorasi mengenai kepentingan Djibouti dalam menerima pangkalan militer Tiongkok.

Dalam hal ini analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang aktual dan realistis. Terakhir, peneliti melakukan beberapa proses pendekatan, penyajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang relevan.. Berikut merupakan beberapa ciri dari tipe penelitian deskriptif analisis:

1. Menjelaskan secara deskriptif terkait fenomena, peristiwa sosial, maupun kejadian-kejadian yang terjadi secara aktual dan faktual;
2. Memberikan penjelasan yang deskriptif terkait subjek penelitian yang sedang dibahas dan dikelola terkait kelompok-kelompok peneliti dalam jangka waktu penelitian yang telah ditentukan bersama.
3. Tipe penelitian deskriptif ini tidak melakukan pengujian terkait hipotesesis, namun melakukan proses interpretasi atau pemahaman secara apa adanya tentang apa saja yang telah terjadi pada objek penelitian yang dipengaruhi faktor-faktor terkait.
4. Melakukan pencarian terkait data-data yang dianggap dapat memberikan informasi menarik dan aktual, proses ini dilaksanakan secara mendetail sehingga proses identifikasi permasalahan mendapatkan pembenaran dari peristiwa yang sedang terjadi.

Metode penelitian kualitatif melibatkan diskusi yang memprioritaskan atau fokus pada topik penelitian, yaitu peristiwa, fenomena, kejadian, dalam konteks data relevan yang berbeda, untuk menunjukkan kemungkinan dan manfaat penelitian yang berbeda, atau untuk mendiskusikan sudut pandang peneliti terhadap beberapa kasus.[16] (Fraenkel and Wallen).Pernyataan tersebut menyatakan bahwa metode penelitian ini pada akhirnya membahas tentang perilaku manusia dan pendalamannya sebagai subjek kajian. Dalam hal ini pendalaman didasarkan pada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi fenomena yang bersangkutan, seperti peristiwa, kegiatan, fenomena, bahkan kejadian yang berkaitan dengan tujuan memperoleh jawaban dari pengamatan yang dilakukan. Dalam hal ini data dan informasi yang berkaitan dengan kejadian atau fenomena yang diteliti diusahakan untuk mendukung argumentasi dan pendapat mengenai fenomena yang dimaksud.

Dalam pendekatan ini, kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian, memahami segala persoalan dan aspek penelitian, serta berbagai hal lain yang berkaitan dengan kemampuannya menjadi sangat penting, dan peneliti dalam hal ini peneliti harus siap. Pendekatan kualitatif akan menjadi topik penting dan memerlukan perhatian yang cermat terhadap keterampilan dan kemampuannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena proposal penelitian ini menggunakan metode data deskriptif dimana peneliti memperoleh informasi dari informan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa perkataan dan perkataan dari suatu masyarakat dan mengamati perilaku yang terjadi di masyarakat sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.[17]

---

[16] Fraenkel, J. K. and N. E. Wallen. How to design and evaluate research in education. New York: The McGraw-Hill Company, 2003.

[17] Melong, J. Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007) 4.

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, jenis ini merupakan metode yang berguna untuk mencari, mencatat, dan mengumpulkan data, menggunakan prosedur pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu yang berarti menyelidiki peristiwa tersebut secara rinci. Jangka waktu untuk mengembangkan gambaran yang sistematis, faktual, terkini mengenai fakta dan realitas yang ada dalam hubungan antara fenomena dan peristiwa yang diteliti.[18]

Selain berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang cermat dan rinci mengenai kejadian tersebut guna memberikan pemahaman terhadap kejadian tersebut situasi yang sedang diteliti.[19]

PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional Djibouti Dalam Menerima Pangkalan Militer Asing

Dalam menerima pangkalan militer China di negaranya, Djibouti memiliki beberapa kepentingan. Djibouti bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam atau memiliki industri besar, namun pendapatan utamanya berasal dari sektor jasa. Salah satu layanan utama yang ditawarkan Djibouti adalah berfungsi sebagai 'pelabuhan' bagi negara-negara yang tidak memiliki akses laut, yang memfasilitasi proses ekspor-impor mereka. Pada tahun 2013, atas permintaan Pemerintah Tiongkok, Djibouti menjadi lokasi pangkalan militer luar negeri pertama bagi Tiongkok. Selain itu, Djibouti memiliki Pelabuhan Doraleh, yang digunakan sebagai fasilitas transit bagi kapal-kapal komersial. Pelabuhan ini cukup besar, dilengkapi dengan fasilitas canggih, dan dibiayai oleh negara-negara besar seperti Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Tiongkok juga mendanai proyek Pelabuhan Doraleh serta pembangunan jalur kereta api Djibouti-Addis Ababa melalui program Belt and Road Initiative. Dengan fasilitas pelabuhan yang canggih dan jalur kereta api yang menghubungkan Djibouti dengan negara-negara tetangga, Djibouti berfungsi sebagai pintu gerbang utama perekonomian di wilayah Tanduk Afrika, karena negara-negara sekitar belum memiliki infrastruktur sebanding[20].

Djibouti juga terletak di selat Bab-el-Mandeb dan Teluk Aden, yang merupakan salah satu kawasan perairan dengan lalu lintas maritim terpadat di dunia. Setiap tahun, sekitar 21.000 hingga 30.000 kapal komersial yang mengangkut berbagai barang melintasi wilayah ini, dengan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Selain sebagai jalur perdagangan maritim, Teluk Aden juga merupakan rute penting untuk distribusi minyak, dengan sekitar 11% pasokan minyak dunia, atau sekitar 4,8 juta barel minyak, melalui kawasan ini.

Meskipun Djibouti berada di lokasi yang sangat strategis, kondisi di sekitarnya tidak sepenuhnya mendukung Djibouti dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Wilayah perairan sekitar Djibouti dikenal dengan tingginya tingkat perompakan kapal yang dapat mengganggu jalur perdagangan maritim. Situasi ini semakin buruk karena lemahnya penegakan hukum laut baik di Djibouti maupun di negara-negara tetangga, seperti Somalia yang menghadapi pembajakan oleh kelompok perompak dan kelompok bersenjata al-Shabaab, serta Yaman yang sedang dilanda perang saudara. Kapabilitas ketiga negara ini masih terbatas dalam menangani masalah perompakan yang terus berlangsung.

[18] Creswell, John. Research Design . 4th. (SAGE,2018) 4
[19] Basorwi dan Surwati, Memahami Penelitian Kualitatif ‘’, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)37.
[20] Lee Jeong-ho, “How the tiny African nation of Djibouti became the linchpin in China’s belt and road plan”,

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

Selain permasalahan perompakan yang dialami oleh Djiobuti, terorisme juga menjadi faktor mengapa Pemerintah Djibouti membuka negaranya bagi negara yang ingin mendirikan pangkalan militer asing. Al-Shabaab, yang berafiliasi dengan kelompok al-Qaeda, merupakan salah satu kelompok bersenjata yang dilawan oleh Amerika Serikat dan dianggap sebagai kelompok teroris. Pangkalan militer Amerika Serikat di Djiobuti memegang peranan penting dalam operasi militer untuk menumpas al-Shabaab, mengingat jarak antara operasi militer mereka yang berada di wilayah Tanduk Afrika tidak begitu jauh dengan pangkalan militer mereka di Djibouti, yang memungkingkan untuk mendapatkan bantuan logistik serta koordinasi lebih cepat.

Selain masalah perompakan yang dihadapi Djibouti, terorisme juga menjadi alasan mengapa Pemerintah Djibouti membuka negaranya bagi negara-negara yang ingin mendirikan pangkalan militer asing. Al-Shabaab, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan al-Qaeda, adalah salah satu kelompok teroris yang dilawan oleh Amerika Serikat. Pangkalan militer AS di Djibouti memainkan peran penting dalam operasi militer untuk memerangi al-Shabaab, karena lokasi pangkalan ini yang dekat dengan wilayah Tanduk Afrika memungkinkan akses cepat untuk bantuan logistik dan koordinasi yang efisien.
Menurut teori Rational Choice yang dikemukakan oleh Allinson, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis tujuan Pemerintah Djibouti dalam menerima kehadiran militer asing, khususnya Tiongkok. Kepentingan Djibouti terkait kedatangan pasukan militer Tiongkok diungkapkan dalam wawancara antara jurnalis CGTN dan Presiden Djibouti, Ismail Omar Guelleh, yang sebelumnya telah dikutip oleh peneliti: “And we are also very pleased to host the first base of the People’s Liberation Army in Djibouti for international security, to fight against piracy, extremism, and terrorism.” Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Djibouti menginginkan keberadaan pangkalan militer asing, termasuk dari Tiongkok, untuk mendukung keamanan internasional dan memerangi perompakan, ekstrimisme, serta terorisme.

Langkah kedua adalah mempertimbangkan berbagai opsi. Dalam merespons isu tentang pangkalan militer asing di Djibouti, peneliti menganalisis opsi-opsi yang dipertimbangkan oleh pemerintah Djibouti. Peneliti menemukan dua kemungkinan opsi yang dimiliki oleh pemerintah Djibouti. Opsi pertama adalah menolak kedatangan militer Tiongkok di Djibouti, yang akan menghalangi Tiongkok mendirikan pangkalan militer di negara tersebut. Dengan opsi ini, Tiongkok tidak akan mendapatkan izin untuk mendirikan pangkalan, yang akan memaksa mereka untuk melaksanakan misi mereka di Afrika tanpa dukungan logistik dari pangkalan militer atau pusat logistik negara mereka sendiri. Opsi kedua adalah menerima kedatangan militer Tiongkok dan memberikan izin untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Dengan opsi ini, pemerintah Djibouti tidak akan membatasi negara lain yang ingin mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Tiongkok akan menggunakan lahan yang mereka sewa untuk mendirikan pangkalan militer, dan mereka akan secara mandiri menyediakan logistik bagi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang bertugas di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, sehingga tidak lagi bergantung pada pelabuhan sipil untuk kebutuhan logistik mereka.

Langkah ketiga adalah mempertimbangkan konsekuensi. Pada tahap ini, terdapat dua konsekuensi yang dihadapi oleh Pemerintah Djibouti jika mereka memutuskan untuk menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer Tiongkok. Dua konsekuensi tersebut adalah menolak kehadiran pangkalan militer Tiongkok di Djibouti atau menerima pendirian pangkalan militer Tiongkok di negara tersebut.

Pertama, menolak pangkalan militer Tiongkok di Djibouti. Dengan menolak permintaan Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti, kemungkinan

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

terjadinya miskomunikasi antara angkatan bersenjata yang berseteru dengan Tiongkok akan berkurang. Miskomunikasi semacam itu dapat memicu ketegangan antara angkatan bersenjata dan berpotensi menimbulkan konflik. Sebagaimana dikatakan oleh analis militer Zhou Chenming, "*The Chinese and US bases in Djibouti are really close, so one could disturb the other if the two sides don't have a proper communication mechanism*." Pertimbangan dalam opsi ini adalah bahwa Tiongkok sedang berselisih dengan negara-negara yang juga memiliki pangkalan militer di Djibouti, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Militer Amerika Serikat di Djibouti relatif besar, dan pangkalan mereka di sana telah ditetapkan sebagai pangkalan militer permanen satu-satunya di Afrika, yang mendukung berbagai operasi, baik militer maupun non-militer, di sekitar wilayah Tanduk Afrika. Sebelumnya, angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Tiongkok sempat terlibat ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.

Amerika Serikat juga terlibat insiden di pangkalan militer mereka di Djibouti. Salah satu pesawat militer AS yang bermarkas di Djibouti terkena serangan laser yang mengganggu penerbangan militer mereka. AS menuduh bahwa angkatan bersenjata Tiongkok yang mengarahkan laser tersebut.[21]

Konsekuensi lain dari opsi ini adalah pengecualian Tiongkok dari negara-negara lain yang mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Hal ini bisa membuat pemerintah Tiongkok merasa keputusan Djibouti untuk menolak pendirian pangkalan militer di negaranya tidak adil. Padahal, menurut pernyataan resmi pemerintah Tiongkok, tujuan pendirian pangkalan militer mereka di Djibouti serupa dengan negara-negara lain yang juga memiliki pangkalan di sana, yaitu untuk misi kontraperompakan. Wilayah perairan sekitar Djibouti, termasuk Selat Bab el-Mandab dan Teluk Aden, merupakan jalur perdagangan maritim penting bagi perdagangan global, namun memiliki kekurangan dalam penegakan hukum maritim. Oleh karena itu, alasan pemerintah Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti demi mendukung kegiatan kontraperompakan dan pengamanan wilayah maritim di sekitarnya pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan negara-negara lain yang juga memiliki pangkalan di Djibouti. Peneliti berpendapat bahwa penolakan terhadap pendirian pangkalan militer Tiongkok dapat mengarah pada penurunan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Hubungan diplomatik Tiongkok – Djibouti erat kaitannya dengan ekonomi. Terdapat kemungkinan kehilangan peluang ekonomi dari hubungan diplomatik Tiongkok- Djibouti bila Djibouti tidak menerima permintaan pemerintah Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Dengan ambisi untuk menjadi negara yang bergerak di sektor jasa layaknya Singapura, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh, "We want to follow the path of Singapore," Djibouti membutuhkan investasi untuk mendukung ambisi tersebut sekitar US$12,4 miliar[22].

Dana tersebut digunakan untuk memperbarui infrastruktur yang ada serta membangun infrastruktur baru. Masalahnya, tidak banyak pihak yang bersedia menanamkan modal atau meminjamkan dana untuk program tersebut di Djibouti. Namun, akhirnya Tiongkok setuju untuk membantu Djibouti mewujudkan ambisi mereka dengan memberikan pinjaman untuk proyek infrastruktur. Pemerintah Tiongkok telah menyediakan pinjaman sebesar US$ 1,4 miliar melalui program Belt and Road Initiative, yang mencakup sekitar 9% dari total biaya yang dibutuhkan pemerintah Djibouti. Pinjaman sebesar US$ 1,4 miliar tersebut setara dengan 75% dari PDB Djibouti, yang

[21] Liu Zhen, "US warns airmen to beware of laser attacks near China's military base in Djibouti",
[22] Edmund Blair. China to Start Work Soon on Naval Base in Djibouti – Guelleh

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

mencapai sekitar US$ 1,7 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Djibouti tidak dapat membiayai program infrastruktur besar mereka tanpa bantuan. Oleh karena itu, jika hubungan diplomatik antara kedua negara memburuk, kemungkinan Tiongkok untuk memberikan pinjaman lebih lanjut akan semakin berkurang.

Konsekuensi ketiga adalah Djibouti akan menjadi salah satu sekutu strategis Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan pendirian pangkalan militer Amerika di Djibouti, yang merupakan satu-satunya pangkalan militer permanen Amerika di Afrika.

Sebuah situasi yang tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat adalah ketika negara 'kompetitor' seperti Tiongkok mendirikan pangkalan militer yang berdekatan dengan pangkalan militer Amerika. Pangkalan militer Amerika di Djibouti juga menjadi satu-satunya pangkalan permanen mereka di Afrika, menjadikannya aset strategis yang penting. Pangkalan ini mendukung berbagai operasi militer Angkatan Bersenjata Amerika di Afrika, seperti misi kontra-terorisme di Yaman dan Afrika Utara melawan al-Qaeda dan al-Shabaab, misi kontra-perompakan di Teluk Aden, serta memberikan bantuan militer kepada angkatan bersenjata di Afrika. Selain itu, pangkalan ini juga menampung aset militer penting, seperti kendaraan lapis baja dan pesawat nirawak bersenjata. Dengan jarak yang sangat dekat, potensi peretasan dan pencurian informasi rahasia di pangkalan militer Amerika menjadi semakin tinggi. Angkatan Bersenjata Tiongkok dapat melakukan kegiatan spionase atau pengumpulan data elektronik intelijen (SIGINT) dari pangkalan mereka. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengungkapkan bahwa database militer mereka, termasuk informasi rahasia dari Angkatan Laut AS dan NASA, telah diretas oleh peretas yang diduga berasal dari Tiongkok [23] . Bila pemerintah Djibouti menolak pembangunan pangkalan militer Tiongkok, maka dapat dipastikan bahwa resiko-resiko bagi Amerika Serikat yang telah peneliti jabarkan akan semakin minim, dan hubungan strategis antar kedua negara akan semakin meningkat.

Kedua, menerima pangkalan militer Tiongkok di Djibouti. Konsekuensi pertama dari menerima kedatangan militer Tiongkok di Djibouti adalah meningkatnya hubungan bilateral antara kedua negara. Djibouti dan Tiongkok telah membangun hubungan diplomatik pada 8 Januari 1979, yaitu sekitar satu setengah tahun setelah Djibouti merdeka. Hubungan kedua negara cenderung semakin erat, terlihat dari kunjungan pejabat tinggi kedua negara yang sering kali saling mengunjungi. Bahkan, pada tahun 2017, Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh menjadi pemimpin pertama dari benua Afrika yang menghadiri Kongres Partai Komunis Tiongkok, sebuah kesempatan yang mungkin tidak diberikan kepada pejabat dari negara lain.

Sejak hubungan diplomatik terjalin pada tahun 1979, kedua negara telah bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti bantuan Tiongkok untuk pembangunan Istana Kepresidenan Djibouti, monumen, stadion, proyek perumahan, hingga kantor Kementerian Luar Negeri Djibouti. Peningkatan hubungan diplomatik akibat diterimanya kedatangan militer Tiongkok di Djibouti juga berhubungan erat dengan hubungan ekonomi antara kedua negara, yang akan dibahas lebih lanjut dalam konsekuensi kedua dari opsi ini. Dapat dipastikan, keberadaan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti akan membawa peluang ekonomi yang signifikan bagi Djibouti.

Kedua, pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti dapat menarik lebih banyak investor dari Tiongkok. Investasi Tiongkok di Djibouti jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa hanya

[23] Kevin Johnson, "Chinese Hackers Accused of Breaching US Military, Government Systems in Global Campaign Linked to Beijing Government", Diakses dari situs USA Today.

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

sedikit negara yang tertarik untuk menanamkan modal atau memberikan pinjaman kepada Djibouti selain Tiongkok. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Djibouti, "They (China) are the biggest investors in our country … They are the ones who were sensitive to what we feel and seek, and our interests are complementary[24].

Dasar analisis mengenai potensi pangkalan militer Tiongkok di Djibouti yang dapat menarik lebih banyak investor dari Tiongkok berkaitan dengan kondisi wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang penuh dengan konflik. Di utara Djibouti, Yaman tengah terlibat dalam perang saudara antara pendukung pemerintah dan kelompok oposisi. Sementara itu, di barat Djibouti, pemerintah Somalia beroperasi dengan kurang efektif, yang menyebabkan berbagai masalah dalam negeri. Ketidakstabilan sosial yang terjadi di Somalia tentunya berdampak langsung pada Djibouti, mengingat kedua negara berbatasan langsung. Di selatan dan barat Djibouti, terdapat kelompok teroris al-Shabaab yang cukup berpengaruh di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Keberadaan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti menjadikan kehadiran militer Tiongkok sebagai jaminan keamanan bagi para investor Tiongkok di negara tersebut. Sebelumnya, melalui angkatan bersenjata mereka, pemerintah Tiongkok telah beberapa kali melakukan operasi militer non-perang untuk mengevakuasi warganya dari wilayah-wilayah yang sedang dilanda konflik. Hal ini menunjukkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan untuk melindungi dan mengevakuasi warga Tiongkok di negara-negara yang tengah menghadapi ketegangan atau perang.

Untuk sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mendukung perekonomiannya, pemerintah Djibouti harus mencari alternatif lain yang dapat menjadi sumber pendapatan negara. Salah satu potensi tersebut terletak pada posisi geografisnya. Djibouti berfungsi sebagai pintu gerbang bagi negara-negara yang tidak memiliki akses ke laut (landlocked), seperti Ethiopia, Sudan Selatan, dan Uganda. Untuk memaksimalkan potensi ini, Djibouti memerlukan infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur maritim maupun infrastruktur darat, yang menghubungkan negara-negara tersebut dengan pelabuhan-pelabuhan di Djibouti. Namun, rencana ini hanya dapat terwujud jika ada investasi atau pinjaman asing yang bersedia mendanai sektor infrastruktur Djibouti. Inilah peran penting negara-negara seperti Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur Djibouti. Banyaknya investasi asing di Djibouti terkait erat dengan dominasi sektor jasa dalam perekonomiannya, yang membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi mereka.

Adapun infrastruktur yang diperlukan adalah jalur kereta api yang menghubungkan Djibouti dengan negara tetangga serta pelabuhan laut dalam yang mampu menangani kargo baik ekspor maupun impor. Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk memberikan dana segar bagi Djibouti untuk pembangunan infrastruktur mereka. Salah satu proyek infrastruktur yang didanai pemerintah Tiongkok adalah jalur kereta api yang menghubungan Ibukota Ethiopia, Addis Ababa dengan Djibouti. Dari US$490 juta biaya yang diperlukan untuk proyek kereta api tersebut, 70 persen dari pembiayaan tersebut dari dana pinjaman Tiongkok.

Infrastruktur yang dibutuhkan mencakup jalur kereta api yang menghubungkan Djibouti dengan negara tetangga serta pelabuhan laut dalam yang mampu menangani kargo ekspor dan impor. Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk memberikan dukungan finansial kepada Djibouti dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satu proyek

[24] Monty Khanna. "The Shifting Sands of Djibouti", Dari Observer Research Foundation Issue Brief, no.331, (Desember 2019): 4

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

infrastruktur yang dibiayai oleh Tiongkok adalah jalur kereta api yang menghubungkan Ibukota Ethiopia, Addis Ababa, dengan Djibouti. Dari total biaya sebesar US$490 juta untuk proyek ini, sekitar 70 persen pembiayaannya berasal dari pinjaman Tiongkok.

Ketiga, salah satu konsekuensi lain dari keberadaan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti adalah pendapatan dari biaya sewa lahan. Meskipun pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa lahan tersebut terbilang kecil, sekitar US$ 20 juta, jumlah ini tetap sangat membantu bagi negara yang memiliki sumber pendapatan terbatas. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pangkalan militer Tiongkok yang baru saja selesai dibangun ini hanya merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Jika ekspansi pangkalan militer Tiongkok benar terjadi, Djibouti berpotensi memperoleh lebih banyak pendapatan dari sewa lahan pangkalan tersebut di masa depan.

Keempat, pembangunan pangkalan militer dapat meningkatkan efektivitas PLAN dalam melaksanakan misi kontra-perompakan di perairan sekitar Djibouti. Semakin efisien PLAN dalam menjalankan misi tersebut, semakin rendah kemungkinan terjadinya perompakan. Sebelumnya, pada tahun 2009, Tiongkok melaksanakan misi yang mereka sebut sebagai escort mission, yaitu misi untuk mengamankan perairan Teluk Aden yang dikenal dengan perompakan kapal, dengan PLAN sebagai pelaksana misi. Dalam misi ini, sedikitnya dua kapal perang dan satu kapal bantu pencarian dan minyak, serta helikopter dan pasukan khusus, dikirim ke Teluk Aden dengan rotasi selama empat bulan. Pada saat itu, PLAN memanfaatkan pelabuhan sipil sebagai pusat logistik dan dukungan di sekitar wilayah misi mereka, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, hingga Afrika Selatan.

Kelima, kehadiran militer asing di Djibouti dapat memicu rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di negara tersebut. Ada kekhawatiran terkait pembangunan pangkalan militer Tiongkok yang berlokasi tidak jauh dari pangkalan militer Amerika di Djibouti. Salah satu bentuk kekhawatiran ini tercermin dalam sebuah penelitian yang disusun oleh para peneliti dari Kongres Amerika. Dalam laporan yang ditujukan kepada pengambil keputusan di Amerika, berjudul *China's Engagement in Djibouti*, terungkap kekhawatiran anggota Kongres dan pemerintah Amerika mengenai semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Afrika, termasuk di dalamnya pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti..

"Several Members of Congress have raised concerns about China's growing role in Djibouti. In 2018 testimony to Congress, General Waldhauser said of the prospect of Chinese surveillance there, "we are not naïve [about it] ... it just means that we have to be cautious." He suggested, though, that there are also "opportunities, especially in Djibouti, where we can work together with the Chinese." In 2019, Waldhauser told Congress that U.S. military access to Djibouti's container port was "necessary and required" for maintaining its presence in the region, and that there could be "significant" consequences if China controlled the port. The Trump Administration has placed a high priority on countering Chinese influence in Africa more broadly. National Security Advisor John Bolton has accused China of "targeting their investments to gain a competitive advantage over the United States" and of "predatory practices" on the continent, citing corrupt and opaque dealmaking, exploitative lending, and self-interested extractive industry activity. This echoes the 2017 National Security Strategy, which portrays Chinese influence as

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

undermining African development "by corrupting elites, dominating extractive industries, and locking countries into unsustainable and opaque debts and commitments[25].

Laporan dari Kongres tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang memiliki kekhawatiran terkait kehadiran militer Tiongkok di Djibouti, dan isu ini kemungkinan akan terus berkembang. Selain itu, persaingan antara kedua negara juga sering terwujud dalam tindakan dan kebijakan, sebagaimana telah dianalisis dalam opsi pertama. Oleh karena itu, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa muncul di Djibouti jika pemerintah Djibouti memutuskan untuk menerima kehadiran militer Tiongkok di negara tersebut..

Langkah keempat adalah mengenai Aspek Pilihan, yang berfokus pada rasionalitas keputusan yang diambil oleh pemerintah Djibouti terkait dengan keberadaan pangkalan militer asing di negara tersebut. Setelah menganalisis berbagai opsi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah Djibouti dalam menyambut kedatangan militer Tiongkok, peneliti akan mengklasifikasikan konsekuensi dari setiap opsi menjadi konsekuensi positif dan negatif. Setiap opsi memiliki dampak baik positif maupun negatif, yang akan membantu peneliti menentukan opsi mana yang paling rasional untuk diambil sebagai kebijakan dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Konsekuensi dari opsi pertama antara lain adalah: (1) mengurangi risiko terjadinya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Djibouti, (2) kehilangan potensi ekonomi dari Tiongkok, dan (3) menjadi sekutu strategis Amerika Serikat. Konsekuensi pertama dan ketiga termasuk dalam kategori positif, sementara konsekuensi kedua masuk dalam kategori negatif.

Konsekuensi dari opsi kedua antara lain adalah: (1) peningkatan hubungan diplomatik antara Djibouti dan Tiongkok yang telah terjalin kuat sebelumnya, (2) memperoleh potensi ekonomi dari investasi Tiongkok, (3) mendapatkan pendapatan dari sewa pangkalan militer Tiongkok yang ada di Djibouti, (4) membantu Djibouti dalam mengoptimalkan potensi negara yang sebelumnya terhambat oleh masalah keamanan regional, dan (5) meningkatnya risiko terjadinya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Djibouti. Konsekuensi pertama, kedua, ketiga, dan keempat termasuk dalam kategori positif, sementara konsekuensi kelima tergolong dalam kategori negatif.

Berdasarkan seluruh konsekuensi, baik positif maupun negatif, dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan, menurut sudut pandang penelitian ini, opsi kedua merupakan pilihan yang sebaiknya diambil oleh pemerintah Djibouti. Seperti yang dijelaskan dalam Bab III, teori Pilihan Rasional (Rational Choice) sangat terkait dengan upaya memaksimalkan nilai dan menganalisis keuntungan serta kerugian dari setiap opsi sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, aktor akan memilih opsi dengan nilai yang paling menguntungkan.

Opsi kedua, yang memiliki lebih banyak konsekuensi positif dibandingkan dengan opsi lainnya, dianggap sebagai keputusan yang lebih rasional. Dengan kata lain, nilai dari opsi kedua lebih besar dibandingkan opsi lainnya. Pemerintah Djibouti memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada pemerintah Tiongkok untuk membangun pangkalan militer di Djibouti, dengan berbagai pertimbangan yang telah dianalisis, salah satunya adalah dampak ekonomi dari pembangunan pangkalan tersebut. Dampak ekonomi langsung yang dirasakan oleh pemerintah Djibouti adalah penerimaan dari biaya sewa lahan yang digunakan oleh Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer asing. Meskipun Djibouti baru saja memiliki pangkalan militer, pemerintah Tiongkok

[25] Lauren Ploch Blanchard dan Sarah R. Collins, China's Engagement in Djibouti, Dari Laporan "Congressional Research Service: In Focus" tahun 2019, 2

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

memutuskan untuk memperluas wilayah pangkalan mereka, yang tentu akan meningkatkan pendapatan bagi Djibouti. Dampak ekonomi tidak langsung yang mungkin terjadi adalah semakin besar peluang investasi dari Tiongkok. Pangkalan militer Tiongkok di Djibouti memberikan jaminan keamanan bagi ekspatriat, pebisnis, serta investasi Tiongkok yang ada di Djibouti, terutama ketika wilayah sekitar Djibouti mengalami masalah keamanan. Selain itu, dengan kebijakan terbuka Djibouti terhadap investasi, pemerintah Tiongkok akan semakin tertarik untuk menanamkan modal mereka di negara tersebut.

Selain faktor ekonomi, kedatangan militer Tiongkok di Djibouti juga menjadi pertimbangan penting mengingat ketidakpastian keamanan regional dan keterbatasan kemampuan angkatan bersenjata Djibouti dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Djibouti mungkin berpikir bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah keamanan, semakin baik hasilnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menerima kedatangan militer Tiongkok, meskipun sudah ada kehadiran militer dari negara lain yang juga memiliki pangkalan di Djibouti. Namun demikian, pemerintah Djibouti harus tetap berhati-hati dalam mengelola kehadiran militer asing di negaranya. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Djibouti, Ilyas Moussa Dawaleh, "Tentu saja, kami khawatir dengan risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran militer dan keamanan internasional." Risiko yang terkait dengan kedatangan pangkalan militer asing yang telah dianalisis sebelumnya masih ada dan berpotensi berkembang seiring waktu.

KESIMPULAN

Pada tahun 2016, Pemerintah Djibouti menyetujui permintaan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC) untuk membangun pangkalan militer di Djibouti. Keputusan ini dianggap berisiko, mengingat pada saat yang sama sudah ada kehadiran militer Amerika Serikat di Djibouti, dan adanya potensi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan Pemerintah Djibouti dalam menerima kedatangan pangkalan militer asing dari Tiongkok.

Salah satu kepentingan utama Djibouti dalam menerima pangkalan militer Tiongkok adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pangkalan militer Tiongkok di Djibouti membawa potensi investasi yang besar, baik langsung melalui pembangunan infrastruktur maupun secara tidak langsung melalui peningkatan jumlah investasi di sektor-sektor lain, seperti perdagangan dan industri. Keberadaan pangkalan ini juga memberikan pendapatan tambahan bagi Djibouti dari biaya sewa lahan yang digunakan oleh Tiongkok, yang sangat membantu mengurangi keterbatasan sumber daya negara tersebut.

Djibouti, yang terletak di kawasan yang rawan konflik dan ketidakstabilan politik, memandang kehadiran militer Tiongkok sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas internal dan regional. Pangkalan militer ini diharapkan dapat berfungsi sebagai jaminan keamanan, baik bagi negara Djibouti sendiri maupun bagi investasi asing yang ada di negara tersebut. Selain itu, kehadiran Tiongkok juga membantu Djibouti dalam mengatasi ancaman-ancaman keamanan regional, seperti terorisme dan perompakan di perairan sekitar Djibouti.

Berdasarkan teori pilihan rasional, keputusan Djibouti untuk menerima pangkalan militer Tiongkok merupakan pilihan yang rasional, mengingat keuntungan jangka

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

panjang yang diperoleh, baik dalam aspek ekonomi, keamanan, maupun geopolitik. Meskipun terdapat potensi risiko, seperti ketegangan internasional, keuntungan yang didapatkan dari sisi ekonomi dan keamanan dianggap lebih besar. Keputusan ini mencerminkan upaya Djibouti untuk memaksimalkan nilai dari pilihan yang ada, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam konteks nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

Agence France-Presse. "Another 'Great Game': Why China's PLA is jostling for position with the world's armed forces in tiny Djibouti".

Al-Fadhat, F., & Prasetio, H. (2018). Debt-Trap Diplomacy: Bagaimana Ekspansi Kapital Cina Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Afrika. *Southeast Asia*, *31*(2), 151-168.

ALFARIZA, R. Z. Kepentingan Tiongkok Dibalik Kerjasama Infrastruktur dengan Sri Lanka di Kawasan Asia Selatan.

Ali, Mahamoud Youssouf. "We Welcome China in Djibouti, just as We Welcomed the West".

Allison, Graham T. "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis" dalam jurnal The American Political Science Review. JSTOR. (1969):3

Ananda, D. (2021). ANALISIS ALASAN TIONGKOK DALAM MENJALIN STRATEGIC PARTNERSHIP DENGAN DJIBOUTI ATAS KEHADIRAN PANGKALAN MILITER LUAR NEGERI PERTAMA BEIJING, 2014-2019.

Anon. "Djibouti".

Anon. "National Interest and International Interest".

Arisanto, P. T., & Maturbongs, A. A. (2023). Analisis Balance of Power dan Economic Interest Tiongkok dalam Pembangunan Pangkalan Militer Pertamanya di Djibouti 2016. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *1*(2), 202-219.

Central Intelligence Agency World Factbook. "Djibouti".

Human Rights Watch. "World Report 2019: Somalia".

Hurley, John Scott Morris dan Gailyn Portelance. "Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective". Center for Global Development Policy Paper No. 121, (2018)

James, G. *Pengantar Djibouti*. Gilad James Mystery School.

Jeong-ho, Lee. "How the tiny African nation of Djibouti became the linchpin in China's belt and road plan".

Johnson, Kevin. "Chinese Hackers Accused of Breaching US Military, Government Systems in Global Campaign Linked to Beijing Government".

Kamerling, Susanne dan Frans-Paul Van der Putten. "An Overseas Naval Presence without Overseas Bases: China's Counter-piracy Operation in the Gulf of Aden". Dari Journal of Current China Affairs 4/2011. (GIGA: Hamburg, 2011)

Khanna, Monty. "The Shifting Sands of Djibouti". Observer Research Foundation Issue Brief no.331. (Desember 2019)

Kuswoyo, L. C. (2023). *Belt and Road Initiative China in East Africa Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pembangunan BRI China dengan Djibouti Pada Tahun 2017-2022* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Li, Shitao. "Djibouti military base 'a manifestation of China's global interests".

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL
Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional
Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 169-187
e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3497

Article History:
Submitted: Jan 21, 2025
Accepted: Feb 18, 2025
Published: Apr 14, 2025

Maulidiyanti, N. (2021). Analisis Motif Akuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka oleh Tiongkok Melalui Kerjasama Belt and Road Initiative pada tahun 2017-2019 Berdasarkan Kekuatan Struktural Susan Strange.

Melvin, Neil. The Foreign Military Presence in the Horn of Africa Region, (Solna: Stockholm International Peace Research Forum, 2019).

Migiro, Geoffrey. "Where Is the Gulf of Aden?".

Mordechai Chaziza. China's Military Base in Djibouti. (Ramat Gan: Bar-Ilan University, 2018)

PITALOKA, D. ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK DALAM PROYEK THE ADDIS ABABA-DJIBOUTI RAILWAY DI ETHIOPIA DALAM RANGKA BELT AND ROAD INITIATIVE.

Ploch, Lauren Blanchard dan Sarah R. Collins. China's Engagement in Djibouti. Dari Laporan "Congressional Research Service: In Focus" tahun 2019. Reuters. "FACTBOX-The Dangerous Gulf of Aden".

Putri, S. Y., & Maâ, D. (2019). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative. *Jurnal Lemhannas RI*, *7*(3), 53-66.

Styan, David. Djibouti: Changing Influence in the Horn's Strategic Hub. (London: Chatham House, 2013).

Sun, Degang dan Yahia H. Zoubir. The Eagle's Nest in the Horn of Africa: US Military Strategic Deployment in Djibouti". Jurnal Africa Spectrum. German Institute of Global and Area Studies. No. 1 (2016)

Sun, Yun. "China and the East Africa Railways: Beyond Full Industry Chain Export". Diakses dari situs Brookings Institution.

Sutton, H. I. Satellite Images Show that Chinese Navy is Expanding Overseas Base.

Trevithick, Joseph "China's Base in the Horn of African Has a Huge Underground Bunker",

U.S. Department of State. "U.S Relations with Djibouti",

U.S. Energy Information and Administration, "Three Important Oil Trade Checkpoints are Located Around the Arabian Peninsula"

Utami, K. W. P., & Kurniawati, E. (2017). Kepentingan Cina dalam Membangun Military Support Hub di Djibouti. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, *21*(1), 1-16.

Vinayak Bhat, "China's Mega Fortress in Djibouti Could Be Model for Its Bases in Pakistan",

Wiyanti, Kiki Pri Utami. "Kepentingan Tiongkok Dalam Membangun Pangkalan Militer di Djibouti (Military Support Hub) (2015-2016)".

Yuting, Su. "China, Djibouti Presidents Agree to Establish Strategic Partnership".

Zhen, Liu. "US warns airmen to beware of laser attacks near China's military base in Djibouti".